

LITERASI INFORMASI DAN MEDIA DI ERA PASCA KEBENARAN: MEMBANGUN DAYA KRITIS PUBLIK MELALUI INSTITUSI PERPUSTAKAAN¹

Oleh Ari Zuntriana

Intisari

Era pasca kebenaran saat ini menjadi fenomena umum di banyak negara, salah satunya ditandai dengan meningkatnya arus peredaran berita palsu di masyarakat. Berita palsu membawa beberapa akibat, antara lain: peredaran industri berita yang hanya mengedepankan judul sensasional untuk menarik pengunjung atau disebut ‘*clickbait*’, mendorong terjadinya *filter bubble* atau kondisi di mana algoritma mesin pencari dan media sosial cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan selera/pandangan pribadi pengguna, dan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat akibat berita yang simpang siur. Menghadapi fenomena ini, perpustakaan harus turut berperan dalam melatih daya kritis pemustaka. Salah satu yang menjadi tugas pustakawan adalah menguasai kemampuan berpikir kritis dan mengevaluasi informasi yang beredar dengan alat yang ada, serta mengajarkannya pada pemustaka. Materi-materi tersebut dapat disampaikan dalam pendidikan literasi informasi yang selama ini telah dilakukan oleh banyak perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Fenomena berita bohong atau lazim disebut dengan ‘*fake news*’ sedang menjamur di banyak negara. Meski bukan hal baru, berita bohong kian populer saat pemilihan presiden AS beberapa saat yang lalu. Dua contoh *hoax* yang mungkin paling banyak diingat publik AS adalah perihal dukungan Paus Fransiskus kepada Donald Trump dan penjualan senjata oleh Hillary Clinton pada pihak ISIS. Buzzfeed (dikutip dalam Ritchie, 2016) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 3 bulan misinformasi tersebut telah berhasil menarik 2 juta komentar,

¹ Juara III Lomba penulisan artikel dalam rangka Dies Perpustakaan UGM ke-66, Maret 2017

suka, share, dan klik link di Facebook. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) pun ditengarai karena andil, salah satunya, peredaran informasi palsu. Hal serupa juga pernah terjadi pada masa pemilihan presiden Indonesia di tahun 2014 (kasus Obor Rakyat) dan kini berulang dalam Pilkada DKI 2017. Disadari atau tidak, Indonesia, sebagaimana banyak negara lainnya, tengah memasuki era pasca-kebenaran (*post-truth*). Saat di mana ‘fakta alternatif’ lebih dipercaya publik dari pada fakta yang sebenarnya.

Oxford English Dictionaries memilih pasca-kebenaran sebagai *word of the year 2016* dan mendefinisikannya sebagai “sebuah ajektif (kata sifat) yang terkait dengan keadaan-keadaan di mana fakta-fakta obyektif kalah berpengaruh dalam membentuk pendapat umum ketimbang daya tarik emosi dan kepercayaan pribadi.” (dikutip dalam Hikam, 2017). Pasca-kebenaran berkaitan erat dengan penyebaran berita bohong di tengah-tengah masyarakat, terutama melalui media internet. Umumnya ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat berita: yaitu mencapai ambisi politik atau menaikkan trafik kunjungan web (Macquerie Dictionary dikutip dalam Hunt, 2017).

Peredaran berita bohong dapat membawa beberapa akibat, antara lain: (1) menyuburkan industri ‘*clickbait*’ (konten web dengan judul sensasional untuk menarik visitor, namun lemah dari segi kualitas dan kredibilitas), (2) menciptakan *filter bubble* di mana algoritma mesin pencari dan media sosial hanya menampilkan informasi yang cenderung disukai, dan (3) berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat dan dapat mempengaruhi opini mereka terhadap isu-isu penting.

Lantas, bagaimana pustakawan harus merespon hal ini? Peran pustakawan dapat dikatakan semakin signifikan mengingat besarnya tantangan yang dihadapi saat ini. Artikel ini mencoba menguraikan tugas-tugas pustakawan dalam membantu meminimalisir peredaran berita bohong sekaligus berkontribusi menjaga kesehatan pemustaka dalam kondisi keberlimpahan informasi dan pasca-kebenaran.

B. PEMBAHASAN

Konsumsi berita bohong, banjir informasi, dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental dan kehidupan masyarakat

Sekitar 35 tahun yang lalu, Baudrillard menyatakan bahwa “kita saat ini hidup dalam dunia yang terus menerus dipenuhi dengan informasi, namun semakin miskin dengan makna” (dikutip dalam Laybats & Tredinnick, 2016). Melihat apa yang terjadi saat ini, ungkapan tersebut semakin relevan. Keberlimpahan informasi dan peredaran berita bohong telah mengaburkan makna antara yang benar dan salah, asli atau palsu. Berita bohong, palsu, maupun fitnah dapat dipoles sedemikian rupa sehingga banyak orang percaya dan ikut serta menyebarkannya. Jika telah tersebar, konfirmasi mengenai status kepalsuannya menjadi tidak menarik dan bahkan mungkin tidak dipercaya oleh (sebagian) masyarakat.

Salah satu contoh misinformasi yang cukup kontroversial adalah kabar mengenai vaksin yang disebut memicu autisme pada anak. Informasi ini disebarluaskan melalui makalah ‘ilmiah’ karya Andrew Wakefield (Wakefield *et al.*, 1998), seorang mantan dokter berkebangsaan Inggris. Meski lebih banyak artikel ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif, masih banyak orang yang pada akhirnya lebih memilih mempercayai Wakefield. Kelompok anti vaksin pun bermunculan di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa misinformasi dalam bidang kesehatan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, yang bahkan mungkin cukup beresiko untuk masa depan anak-anak dan generasi mendatang.

Selain peredaran *hoax*, saat ini masyarakat juga dihadapkan dengan keberlimpahan informasi. Informasi yang terlalu banyak diyakini dapat memicu kelelahan mental yang biasa disebut dengan *information fatigue syndrome (IFS)*, dengan beberapa gejala antara lain berupa sulit berkonsentrasi akibat penggunaan memori jangka pendek secara terus menerus,

multi-tugas yang berlebihan, penurunan produktivitas, stres, dan kelelahan mental (Chard, 2002). Sindrom ini muncul ketika seseorang terlalu terekspos dengan media, teknologi, dan informasi.

Banyaknya informasi juga menyulitkan orang dalam menilai relevansinya, sehingga berpotensi mempengaruhi proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan (Schwartz dalam Blummer & Kenton, 2014). Dalam dunia kerja, dampak dari informasi yang terlalu banyak adalah waktu yang terbuang untuk memeriksanya, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, distraksi, dan stres (Reuters dalam Wilson, 2001). Besarnya pengaruh kualitas dan kuantitas informasi tersebut mendorong UNESCO mengkaji langkah strategis meningkatkan *skill* literasi masyarakat.

Urgensi literasi informasi dan media dan peran pustakawan di dalamnya

Dilatarbelakangi oleh kepedulian akan semakin besarnya pengaruh dan konvergensi media, informasi, dan TIK di tengah masyarakat, sekaligus makin sulitnya menilai relevansi informasi, UNESCO merumuskan 5 hukum literasi informasi dan media (*media and information literacy/MIL*) sebagai berikut (Singh, Kerr, & Hamburger, 2016):

- a. “Hukum 1: informasi, komunikasi, perpustakaan, media, teknologi, internet, dan penyedia informasi lainnya digunakan untuk mendorong partisipasi publik dan pembangunan berkelanjutan. Semua penyedia informasi tersebut berkedudukan setara dan tidak ada yang lebih relevan satu dibanding yang lainnya.
- b. Hukum 2: setiap warga negara adalah pencipta informasi/pengetahuan dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Mereka harus diajarkan dan diberi jalan untuk mengakses informasi/pengetahuan baru dan untuk mengekspresikan diri. Literasi informasi dan media adalah untuk laki-laki dan perempuan secara setara dan merupakan sebuah neksus dari HAM

- c. Hukum 3: informasi, pengetahuan, dan pesan tidak selalu bebas nilai dan bias. Setiap konseptualisasi, penggunaan, dan aplikasi literasi informasi dan media harus dengan transparan menyebutkan hal tersebut dan dapat dipahami oleh semua warga negara
- d. Hukum 4: setiap warga negara pada dasarnya memiliki keinginan untuk mengetahui dan memahami informasi, pengetahuan, dan pesan yang baru, serta mengkomunikasikannya, meskipun mereka tidak menyadari, mengakui atau menyatakannya. Hak-hak setiap warga negara tersebut harus tetap dipenuhi
- e. Hukum 5: literasi informasi dan media tidak dapat dikuasai seketika, melainkan sebuah proses dan pengalaman yang dinamis dan terus berjalan. Bisa dipandang lengkap jika di dalamnya terdapat pengetahuan, *skill*, dan sikap, serta mencakup akses, evaluasi/*assessment*, penggunaan, produksi dan komunikasi informasi, dan konten teknologi dan media.”

Menurut hukum pertama MIL, perpustakaan berada sejajar dengan penyedia informasi lainnya dalam hal relevansi. Dengan demikian, *self-claim* yang sering kita dengar bahwa perpustakaan merupakan sumber informasi yang paling relevan dapat diperdebatkan. Seperti halnya sebuah entitas, orang-orang di dalamnya *lah* yang mampu membuat perbedaan. Laiknya seorang arsiparis bagi sebuah lembaga arsip atau editor di sebuah kantor media, pustakawan bertanggung jawab mengawal institusi perpustakaan dalam penyediaan informasi relevan. Selain itu pustakawan juga memiliki tugas melatih dan mengembangkan kemampuan literasi pemustaka. Sehingga, tak berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan sebuah perpustakaan bergantung pada kualitas SDM pustakawannya.

Hasil studi terbaru The Stanford History Education Group menyimpulkan bahwa kemampuan siswa sekolah menengah dan mahasiswa di 12 negara bagian AS dalam mengevaluasi kredibilitas informasi *online* masih tergolong lemah (Wineburg & McGrew, 2016). Mayoritas mahasiswa dalam penelitian tersebut tidak dapat membedakan antara media

arus utama dengan media propaganda ('*fringe sources*' atau '*fringe media*'). Dalam konteks Indonesia, belum ditemukan data dan penelitian yang berfokus dalam topik ini. Namun, melihat kondisi masyarakat saat ini, sangat dimungkinkan gejala yang sama juga sedang terjadi.

UNESCO dalam strateginya memutuskan untuk memadukan literasi informasi dan media sebagai sebuah kesatuan. Mereka memandang bahwa kurikulum MIL akan lebih memiliki pendekatan yang holistik jika keduanya diintegrasikan. MIL sangat penting untuk masyarakat terbuka yang berbasis pada informasi dan pengetahuan dengan alasan: 1) untuk kebutuhan partisipasi dan survival masyarakat, 2) sebagai hal pokok dalam proses demokrasi, 3) membentuk persepsi, keyakinan, dan sikap, dan 4) sebagai respon terhadap peningkatan dalam konten yang dibuat oleh pengguna internet, penggunaan ruang maya, dan jurnalisme warga yang membutuhkan kemampuan MIL (UNESCO, n.d.).

UNESCO (Moeller, Joseph, Lau, & Carbo, 2010) juga mengembangkan kurikulum literasi informasi dan media untuk pengajar dengan elemen-elemen kunci sebagai berikut:

1. Literasi informasi

- Mendefinisikan dan mengartikulasikan kebutuhan informasi
- Menemukan dan mengakses informasi
- Mengorganisasi informasi
- Menggunakan informasi secara etis
- Mengkomunikasikan informasi
- Menggunakan *skill-skill* TIK untuk mengolah informasi

2. Literasi media

- Memahami peran dan fungsi media dalam masyarakat demokratis
- Memahami kondisi dalam keadaan bagaimana media dapat memenuhi fungsinya
- Mengevaluasi konten media secara kritis dalam kaitannya dengan fungsi media

- Menguasai *skill-skill* yang diperlukan untuk membuat konten (*user-generated content*)
- Menggunakan TIK dalam prosesnya

Untuk praktiknya, perpustakaan di Indonesia dapat mencantoh pelatihan literasi media yang telah dilakukan sebelumnya di negara lain. Dallas Public Library, misalnya, bekerjasama dengan para jurnalis melatih kemampuan literasi media pemustaka remaja. Wartawan bertugas mengajarkan cara melakukan tugas jurnalisme komunitas, sedangkan pustakawan melatih remaja dalam menggunakan alat multimedia editing (Banks, 2016). Selain itu, perpustakaan melalui website resmi juga dapat menyebarkan panduan untuk mengidentifikasi berita palsu. Beberapa poin penting yang perlu ditekankan, antara lain:

- Perlunya membaca dan menelaah artikel secara keseluruhan dan mengenali media yang menulisnya sebelum memutuskan memberikan suka atau membagi sebuah berita
- Membaca secara kritis dengan selalu mempertanyakan tujuan penulisan berita, melakukan verifikasi melalui sumber-sumber yang kredibel (bila perlu), dan memeriksa autoritas penulis serta tanggal dan waktu terbit artikel
- Melakukan pengecekan fakta di situs dan aplikasi *fact-checking*, seperti turnbackhoax.id, factcheck.org, politifact, dan lain-lainnya
- Jika *hoax* berupa gambar, pengecekan fakta dapat dilakukan dengan ‘*Google reverse image search*’
- Setiap pribadi umumnya memiliki kecenderungan tertentu dalam hal kepercayaan dan pilihan politik, ada baiknya untuk berhati-hati terhadap *confirmation bias* atau tendensi menafsirkan informasi baru untuk mengkonfirmasi keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya.

Selain melalui pelatihan dan penerbitan panduan, pustakawan juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis pemustaka melalui beragam pendekatan,

misalnya metaliterasi dan transliterasi. Konsep metaliterasi dikembangkan oleh Thomas P. Mackey dan Trudi E. Jacobson (Mackey & Jacobson, 2010) dengan menitikberatkan pada “kemampuan berpikir kritis dan upaya kolaboratif di era digital”. Sedangkan transliterasi berkaitan dengan “kemampuan membaca, menulis, dan berinteraksi di semua jenis platform, perangkat, media, serta budaya” (Thomas et al., 2007). Dua konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan literasi informasi dan media, namun bersifat melengkapi.

Salah satu tulisan menarik tentang implementasi transliterasi dalam layanan perpustakaan adalah pengalaman Anamika Megwalu, pustakawan di York College Library, dalam membimbing mahasiswa mengerjakan tugas tentang Arab Spring (Megwalu, 2015). Dengan mengetahui cara memanfaatkan berbagai *platform* serta bagaimana melakukan riset yang tepat, Megwalu mampu membantu mahasiswa meredefinisi topik yang mereka pilih dan secara kritis menemukan *peer-reviewed* jurnal yang sesuai meski topik tersebut masih terbilang baru pada saat itu. Kemampuan untuk menerjemahkan konsep-konsep literasi kontemporer tersebut dalam konteks layanan keseharian menjadi tugas yang menantang sekaligus menarik bagi pustakawan.

C. KESIMPULAN

Era pasca kebenaran membawa tantangan besar untuk dunia kepustakawan. Mereka saat ini menghadapi tugas yang sangat kompleks yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Kencangnya arus penyebaran informasi tidak sehat menjadi tantangan yang perlu ditangani dengan langkah strategis, seperti inovasi dalam pelatihan literasi informasi dan media, serta pendekatan-pendekatan lain yang sesuai.

Salah satu prasyarat penting untuk mendukung misi perpustakaan sebagai penyedia informasi ‘sehat’ dan berkualitas adalah kemauan pustakawan untuk terus belajar melampaui bidang-bidang ‘tradisional’ yang telah dikuasai. Fasilitas MOOC (*massive open online*

course) dan webinar gratis yang diselenggarakan oleh universitas dan asosiasi perpustakaan di luar negeri bisa menjadi jalan untuk meningkatkan *skill* dan wawasan. Dengan terus mengikuti perkembangan yang sedang terjadi diharapkan pustakawan dapat berperan banyak dalam membantu pemustaka menyaring informasi yang tepat sekaligus mendukung perpustakaan untuk terus relevan dalam era pasca-kebenaran dan berbagai era dan tren yang mungkin berkembang di masa mendatang.

Daftar pustaka

- Banks, M. (2016, December 27). Fighting fake news : how libraries can lead the way on media literacy. Retrieved February 23, 2017, from
<https://americanlibrariesmagazine.org/2016/12/27/fighting-fake-news/>
- Blummer, B., & Kenton, J. M. (2014). Reducing patron information overload in academic libraries. *College & Undergraduate Libraries*, 21(2), 115–135.
<https://doi.org/10.1080/10691316.2014.906786>
- Chard, P. (2002). Information overload are we technology's masters... or servants? *WorldAtWork Journal*, 11(3), 17–24.
- Hikam, A. S. (2017, March 1). Politik pasca-kebenaran dan masa depan Indonesia. Retrieved from <http://www.mashikam.com/2017/01/politik-pasca-kebenaran-dan-masa-depan.html>
- Hunt, E. (2017, January 24). “Fake news” named word of the year by Macquarie Dictionary. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jan/25/fake-news-named-word-of-the-year-by-macquarie-dictionary>
- Laybats, C., & Tredinnick, L. (2016). Post truth, information, and emotion. *Business Information Review*, 33(4), 204–206. <https://doi.org/10.1177/0266382116680741>

- Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2010). Reframing information literacy as a metaliteracy. *College & Research Libraries*, crl-76r1.
- Megwali, A. (2015). Encouraging transliteracy through reference instructions. *The Reference Librarian*, 56(2), 157–160. <https://doi.org/10.1080/02763877.2015.1001249>
- Moeller, S., Joseph, A., Lau, J., & Carbo, T. (2010). Towards media and information literacy indicators. UNESCO. Retrieved from http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/unesco_mil_indicators_background_document_2011_final_en.pdf
- Ritchie, H. (2016, December 30). Read all about it: the biggest fake news stories of 2016. *CNBC*. Retrieved from <http://www.cnbc.com/2016/12/30/read-all-about-it-the-biggest-fake-news-stories-of-2016.html>
- Singh, J., Kerr, P., & Hamburger, E. (Eds.). (2016). *Media and information literacy: reinforcing human rights, countering radicalization and extremism*. Paris: UNESCO.
- Thomas, S., Joseph, C., Laccetti, J., Mason, B., Mills, S., Perril, S., & Pullinger, K. (2007). Transliteracy: crossing divides. *First Monday*, 12(12). Retrieved from <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2060>
- UNESCO. (n.d.). MIL as composite concept | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved February 24, 2017, from <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/>
- Wakefield, A. J., Murch, S. H., Anthony, A., Linnell, J., Casson, D. M., Malik, M., ... others. (1998). *RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children*. Elsevier. Retrieved from <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673697110960>

Wilson, T. D. (2001). Information overload: implications for healthcare services. *Health Informatics Journal*, 7(2), 112–117.

Wineburg, S., & McGrew, S. (2016). *Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning* (Working paper). Stanford History Education Group. Retrieved from <http://apo.org.au/node/70888>